

**SKRIPSI**

**PERANAN BULOG DALAM UPAYA STABILISASI HARGA PANGAN  
(STUDY KASUS PADA BULOG SUBDIVERE) PANAIKANG KOTA  
MAKASSAR**

**DISUSUN OLEH  
ALI AHMAT KELIWOY**

**45 11 033 006**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

**FAKULTAS PERTANIAN**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

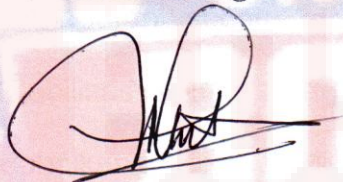
**Peran Bulog Dalam Upaya Stabilisasi Harga Pangan (Studi Kasus  
Pada Bulog Subdevire) Panaikang Kota Makassar**

**ALI AHMAT KELIWOY**

**45 11 033 006**

**Skripsi Ini Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh**

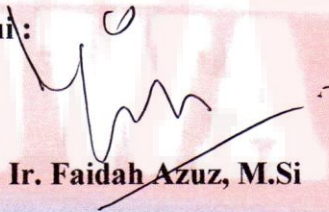
**Pembimbing I**



**Ir. M. Jamil Gunawi, M. Si**

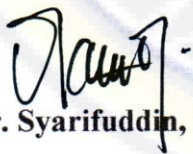
**Pembimbing II**

**Mengetahui:**



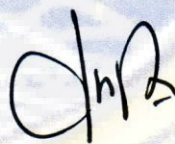
**Dr. Ir. Faidah Azuz, M.Si**

**Dekan Fakultas Pertanian**



**Dr. Ir. Syarifuddin, S,Pt, MP**

**Ketua Jurusan Agribisnis**



**Dr. Ir. Aylee Christine, M. Si**

**Tanggal Lulus : 31 Agustus 2018**

## **ABSTRAKSI**

### ***PERANAN BULOG DALAM UPAYA STABILISASI HARGA PANGAN (STUDY KASUS PADA BULOG SUBDIVERE) PANAIKANG KOTA MAKASSAR”.***

Ali Ahmat Keliwooy, di bimbing oleh Bapak **Ir. M. Jamil Gunawi, Msi** selaku pembimbing I dan **Dr.Ir. Faidah Azuz, M.Si.** Selaku pembimbing II pada Jurusan Agri Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar.

Pembahasan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemaparan secara deskriptif tentang Peranan BULOG Dalam Upaya Stabilisasi Harga Pangan (STUDY KASUS PADA BULOG SUBDIVERE) Panaikang Kota Makassar. dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggambarkan tentang stabilisasi harga Pangan pada Bolog di kota makassar.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, jenis data yang di gunakan adalah data primer yang penulis peroleh langsung dari sumber pertama dalam proses penelitian. Dan data sekunder yang telah di siapkan oleh berbagai instansi terkait yang relefan dengan penelitian ini, selain itu juga penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: (a). telah pustaka di mana data yang penulis peroleh melalui penelusuran lawat literature – literature yang berkaitan dengan judul. (b). teknik analisa data dimana penulis menggunakan teknik analisa kualitatif di mana analisa di arahkan pada data non-matematis, sebagai pelengkap di

ikut sertakan pula data kuantitatif dari angka-angka statistik jika data-data tersebut memiliki keterikatan dengan judul penelitian.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah tentunya di butuhkan strategi untuk stabilisasi harga beras pada suatu wilayah khususnya dikota Makassar,.

Sebagaimana termuat dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996).Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan.Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Bulog Subdevire Panaikang Kota Makassar, dalam melakukan perumusan tentang strategi dan peran terhadap stabilisasi harga pangan pada Bulog Subdevire Panaikang sudah semakin baik dari stategi pengambilan kebijakannya. disisilain juga Bulog Subdevire Panaikang telah menerapkan kebijakan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah, hal ini juga mapu menjaga stabilisasi haraga panagan di Kota Makassar.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan Semesta Alam), atas Berkat Akal yang diberikan serta kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu sosial ekonomi pertanian pada Fakultas pertanian Universitas Bosowa Makassar.

Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawah umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan yang diberikan rahmat untuk menuntun umat manusia ke jalan yang di rahmati dan diridhoi oleh Allah SWT, serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-hadist yang merupakan sumber dari segala pengetahuan.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Abu Bakar Keliwooy, dan Ibunda Boiju Sikdewa Serta Ayahanda Musa Sikdewa, Ayahanda Jumat Sikdewa, Ayahanda Isa Sikdewa, Abangku Tercinta Eky, Ibunda Fajar El, Ibunda Janiba Sikdewa, dan yang aku sayangi dan cintai, yang telah dipanggil kembali menghadap sang Pencipta Alam Semesta Alm. Hajjah Sikdewa semoga belaian tangan dinginmu membawa engkau ke Arshnya Tuhan dan ditempatkan bersama Bidadari-Bidadari Syurga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada segenap Keluarga Besar yang berada di utian Elnama tercinta.

Saya telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya sadar dengan bantuan banyak pihak karya tulis ini dapat terselesaikan, karena tanpa bantuan dan dukungan bisa saja karya tulis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Maka saya menghaturkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Aksa Mahmud selaku ketua Yayasan Universitas Bosowa Makassar
2. Rektor Universitas Bosowa Makassar
3. Dr.Ir.Syarifuddin,S.Pt.M. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Bosowa Makassar
4. Ketua Jurusan Ilmu Sosia Ekonomi (SOSEK) Bosowa Makassar.
5. Bapak Ir. M. Jamil Gunawi, Msi. Selaku Pembimbing I
6. Ibu Dr.Ir. Faidah Azuz, M.Si. Selaku Pembimbing II
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing saya dalam spesifikasi ilmu yang galuti di dalam perkuliahan
8. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Pertanian atas pelayanannya selama ini
9. Bapak/Ibu seluruh pegawai Kantor Perum Bulog Subdevire Kota Makassar
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian
11. Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Kecamatan Werinama

12. Keluarga Besar Keliwooy dan Sikdewa yang ada di yena Elnama,  
dan di Makassar

Terima Kasih untuk , Kaka Aisa Keliwooy, Kaka Faraida Keliwooy dan Kaka Safia Keliwooy. yang sangat aku sayangi, adikku Ruslan Azis Sikdewa Amin Rahman Sikdewa, Adikku Moh Arfandi Sikdewa, Adikku Alwi Azis Sikdewa. Untaian kata buat adik-adikku; Jadilah Petarung dibumi Tuhan ini karena sejatinya petarung adalah manusia yang memanusiaikan manusia. Janganlah engkau ragu adik-adiku, sebab Dunia ini tempat kita merantau mencari hakikat pengetahuan dan esok adalah kemenangan bagi orang-orang yang berilmu, dan pergunakanlah akalmu sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya jangan tergiyur dengan kemegahan sekejab sebab kita dikonstruksi dalam tatanan zaman yang berbeda.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, sekiranya tulisan ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan saya selaku penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga menjadi awal dan menuju kemasa depan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar , 21 Ferbuari 2018

Penulis

Ali Ahmat Keliwooy

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Konsep Peranan .....	9
B. Pengertian Bulog.....	11
C. Pengertian Ketahanan Pangan .....	13
D. Bulog Dalam Pilar Ketahanan Pangan .....	14
E. Sejarah Kebijakan Bulog dan Arahnya Kedepan.....	17
F. Fakator-faktor yang Menentukan Efektifitas Kebijakan Harga Pangan .....	20
G. Dampak Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan ..	21
H. Manfaat Stabilisasi Harga Pangan .....	23
BAB III. METODE PENELITIAN .....	25
A. Penentuan Waktu dan Tempat Penelitian .....	25
B. Metode Pengumpulan Data.....	25



a. Jenis Data	25
C. Metode Analisis Data .....	26
D. Konsep Operasional.....	27
BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN .....	30
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	30
B. Sarana dan Prasarana pada Bulog Subdivisi Panaikang Makassar .....	40
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	47
D. Struktur Organisasi Subdivisi Regional Tipe B .....	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Peran Bulog Dalam Kebijakan Harga Beras .....	50
B. Pengadaan atau pembelian beras dalam negeri .....	55
C. Penyaluran Atau Distribusi Beras Rendah .....	64
D. Operasi Stabilisasi Harga.....	65
E. Mengelola Cadangan dan Menjaga Cadangan Beras .....	76
F. Menjaga harga HPP .....	77
G. Pengelolaan penyebab stok yang merata .....	79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

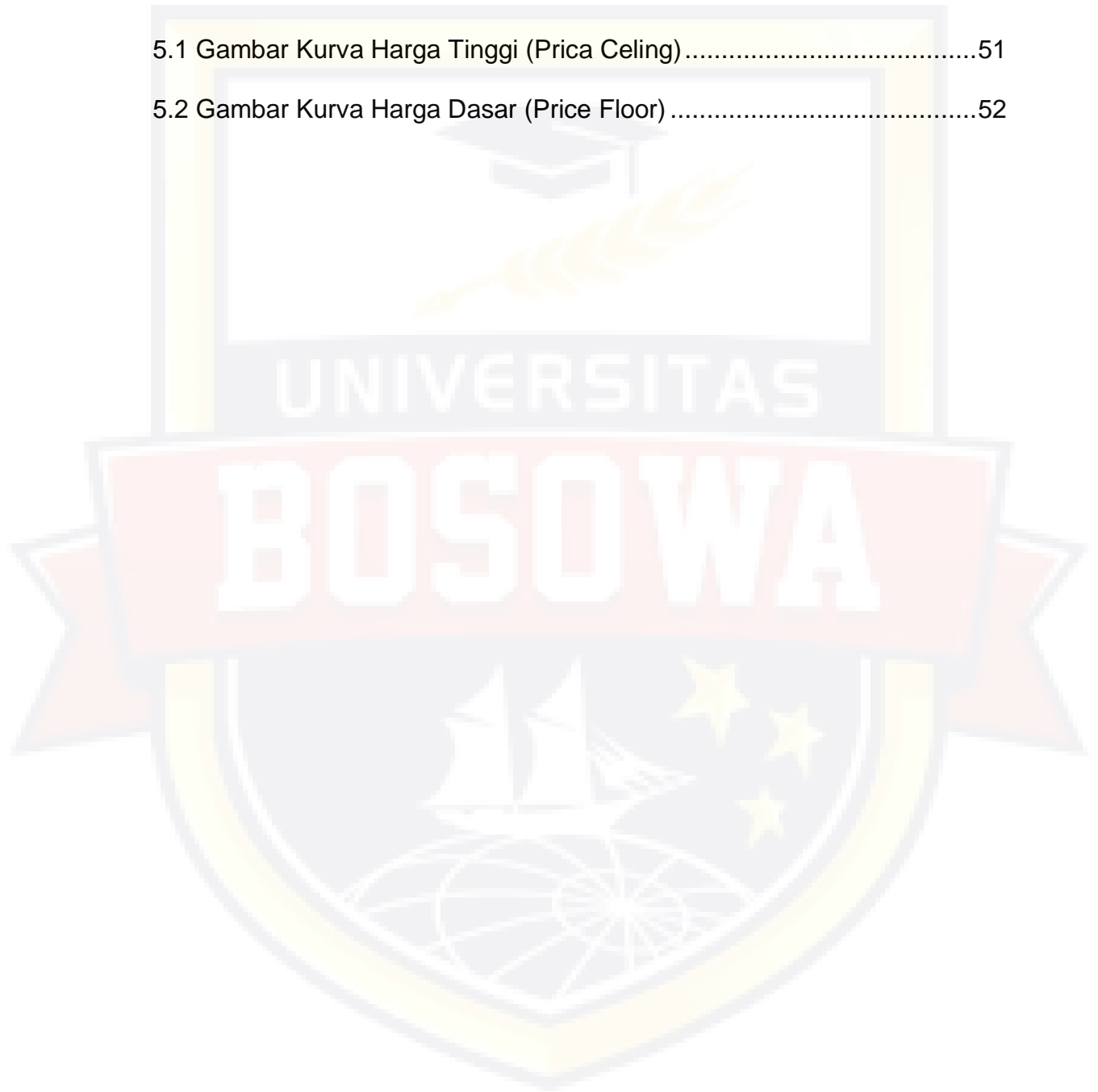
## DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.....	34
4.2 Klasifikasi.....	45
4.3 Kepegawaian Bulog Subdevire Makassar Panaikang .....	48
4.4 Struktur Organisasi Subdivisi Regional Tipe B.....	48
5.3 Harga Pasar, Harga Dasar dan Harga Atap Beras Tahu 2017.....	52
5.4 <i>Data Harga Beras 2017</i> .....	53
5.5 Struktur Kampus Perum Bulog .....	55

**BOSOWA**

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
5.1 Gambar Kurva Harga Tinggi (Prica Ceiling).....	51
5.2 Gambar Kurva Harga Dasar (Price Floor) .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Surat Ijin Penelitian Awal
3. Biodata Peneliti



## BIODATA PENELITI

NAMA : ALI AHMAT KELIWOY  
STAMBUK : 4511033006  
TTL : WERINAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
(SBT) MALUKU  
ALAMAT : WERINAMA  
AGAMA : ISLAM  
ASAL SEKOLAH :  
SD : NEGRI 1 WERINAMA  
SMP : NEGRI 1 WERINAMA  
SMA : NEGRI 1 WERINAMA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penduduk dunia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050 dari saat ini. Jumlah penduduk dunia saat ini lebih dari 7 miliar orang dan diperkirakan bertambah menjadi 14 miliar dalam waktu kurang dari empat dasawarsa mendatang. Saat ini pun, persoalan yang menyebabkan rawan pangan sudah terjadi.

Dunia sebenarnya memiliki cukup pangan namun distribusi menjadi masalah rumit. Cukupnya pangan tak disalurkan ke wilayah-wilayah yang tepat, sebagian pangan di negara-negara tertentu menjadi sia-sia, masalah itu sangat genting karena kebutuhan pangan dalam jumlah besar harus dipenuhi tanpa merusak tatanan dunia, kondisi saat ini saja cukup mengkhawatirkan.

Persoalan berat kedepan yakni, kita harus menggandakan produksi pangan dunia. Para pemangku kepentingan pertanian perlu berinvestasi lebih besar dalam bentuk petani kecil. Petanian kecil harus menjadi solusi di dunia saat ini. Terdapat 500 pertanian kecil dan para pelakunya mampu menyediakan pangan untuk 2,5 miliar penduduk dunia. Buatlah petani kecil menjadi bagian dari pemecahan masalah pangan. Tapi, pertama-tama, mereka harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dari lahan sendiri.

Harus ada data terkait hasil produksi masing-masing komoditas itu akan<sup>1</sup> Jauh lebih menenangkan psikologis pasar, jelasnya. Terkadang menurut pemerintah aman pada saat ini, namun di lapangan berbeda sekali kondisinya. Karena faktanya aman menurut Kementan, (tetapi) itu tidak aman di lapangan.<sup>2</sup>

Seperti diketahui, bulan Ramadhan yang juga merupakan bulan puasa bagi umat muslim Indonesia jatuh di akhir<sup>3</sup> Mei 2017. Biasanya, harga-harga kebutuhan pokok akan naik menjelang Ramadhan, sesuai dengan demand masyarakat yang meningkat

Selama ini, fungsi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) diantaranya adalah menjaga harga komoditas beras. Namun kali ini, pemerintah memastikan fungsi Bulog akan bertambah. Tidak hanya mengelola beras namun juga mengelola komoditas pangan lainnya seperti minyak, gula, ataupun kedelai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Jumat 5 April 2013. menegaskan akan menambah fungsi dari Perum Bulog. Rencananya penambahan beberapa komoditas pangan ini diambil yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. "Intinya adalah penguatan fungsi dari Bulog,

---

<sup>1</sup> <https://m.tempo.com/read/news/2013/04/05/090471473> (Hata Rajasa 5 April 2013 /peran-bulog-untuk-menjaga-harga-pangan-diperluas).

<sup>2</sup> <sup>2</sup> <https://m.tempo.com/read/news/2013/04/05/090471473> (Hata Rajasa 5 April 2013 /peran-bulog-untuk-menjaga-harga-pangan-diperluas).

<sup>3</sup>

Hatta menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim yang akan mengkaji rencana penambahan fungsi Bulog.

Nantinya tim akan melaporkan apa saja komoditas pangan yang hams dikelola oleh Bulog apakah beras ditambah kedelai atau minyak dan seterusnya, jelasnya. Dari tim tersebut, akan dilakukan pengkajian komoditas apa saja yang perlu dijaga oleh Bulog maupun kesiapan Bulog. Diketahui terpisah, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Indonesia saat ini harus patuh pada harga pangan di tingkat internasional karena produktivitas pangan yang masih lemah. "Sepanjang kita tidak bisa menghasilkan dan mengembangkan produk tanaman pangan, seperti kedelai, gula, atau jagung secara mandiri, kita tergantung impor dan tentu mengikuti perkembangan harga yang terjadi kemarin. komitmen pemerintah untuk merevitalisasi.

Bulog menjadi stabilisator harga pangan strategis selain beras, jika tidak diikuti dengan komitmen untuk mengembangkan secara mandiri pemenuhan kebutuhan dan bahan baku, tentu akan sangat sulit, kecuali apabila Bulog juga diberikan peran untuk intervensi anggaran.

Perlu komitmen dan kebijakan pemerintah yang konsisten terhadap upaya penyediaan pangan dan stabilisasi harga, perlu ada dukungan yang kuat dan regulasi bagi penguatan peran Bulog dan fungsi Bulog, dalam rangka merealisasikan memperluas pengelolaan 5 komoditas pangan yang menjadi keinginan Bulog. Perlunya sinergi dan koordinasi antar



kementerian/lembaga terkait penyediaan pangan dan stabilitasi harga, seperti dengan Kemendag, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian keuangan, Kementerian dalam negeri dan lain-lain.

Selain itu, butuh komitmen pemerintah daerah yang mendukung upaya penyediaan pangan dan stabilitas harga. Juga sinergi antar BUMN dan swasta dalam mendukung penyediaan pangan dan stabilitas harga, seperti diketahui berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/ beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, Bulog mendapat tugas antara lain melakukan pengadaan beras di dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui pengadaan beras dalam negeri, menjaga harga di tingkat petani, menjaga kecukupan stok.<sup>4</sup>

Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen, peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi. Bulog mendapat tugas menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bulog juga menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga

---

<sup>4</sup> <https://www.google.com/search?q> ( Agus Saifullah, :Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional diakses dari :tanggal 3 Agustus 2017. pukul 13:00.)

beras, menanggulangi keadaan darurat bencana dan rawan pangan dengan mengelola cadangan beras pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya, peran Bulog tidak hanya terbatas pada beras saja tetapi juga pada pengendalian harga dan penyediaan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedelai dan pakan ternak, minyak goreng, telur dan daging serta juga bumbu-bumbuan, yang dilakukan secara insidentil terutama saat situasi harga meningkat.

Perlindungan kepada petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama, sedangkan untuk stabilisasi harga konsumen mulai berkurang sejalan dengan terus tekannya harga beras domestik. Sebaliknya peran Bulog untuk membantu kelompok miskin yang rawan pangan semakin menonjol, problem ketahanan pangan merupakan persoalan global yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia.

Dalam the World Food Summit 1996 di Roma, Italia, dinyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah ketika semua orang, disetiap waktu, memiliki akses untuk memperoleh kecukupan<sup>5</sup> dan keamanan pangan, serta sumber pangan bergizi untuk memenuhi<sup>6</sup> kebutuhan hidup dan menunjang kesehatan.

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan kesejahteraan suatu wilayah,

---

<sup>5</sup> <https://www.google.com> ( BOKS I : Pengembangan Pilot Project Program Ketahanan Pangan Berasdi Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan,

<sup>6</sup>Di akses dari.<http://www.kompasiana.com> Data Kemiskinan BPS Menampar Kebanggaan Sulawesi Selatan. [bps-menampar-kebanggaan-sulawesi-selatan](http://bps-menampar-kebanggaan-sulawesi-selatan).

ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Penguatan ketahanan pangan beras di tingkat nasional hingga daerah merupakan isu yang krusial bagi Indonesia. beras merupakan komoditas strategis karena sekitar 25,4 juta penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dengan padi sebagai tanaman utama. selain itu, beras merupakan kebutuhan pangan pokok bagi hampir seluruh penduduk Indonesia.

Sulawesi Selatan merupakan satu dari 33 provinsi di Indonesia yang sejak zaman Orde Baru hingga kini masih menyandang sebagai daerah penyangga pangan nasional. predikat yang disandang tersebut, telah memosisikan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai daerah ketiga terbanyak produksi padinya setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun jika dilihat dari sisi jumlah penduduk Sulsel yang tercatat hanya sekitar delapan juta jiwa dengan jumlah produksi beras atau gabah rata-rata 2,5 juta ton per tahun, maka Sulsel setiap tahunnya mengalami surplus.

Rata-rata konsumsi masyarakat di daerah ini hanya sembilan ribu ton per bulan, sehingga sisa dari produksi yang ada terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton per tahun, termasuk yang diantar , terkait dengan harga beras di lapangan, dia mengatakan, karena Sulsel terbilang produsen yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, biasanya tidak mengalami gejolak harga

beras yang berarti. .

Terkait dengan fluktuasi harga beras di lapangan, pedagang pengecer di Pasar diketahui bahwa harga beras yang biasanya naik pada masa tanam hanya yang kualitas utama, seperti beras kepala, Celebes dan Ciliwung, namun biasanya kenaikannya hanya Rp200 per kg. Sedang beras medium, tidak terlalu mengalami perubahan harga pada saat musim tanam. sementara pada musim panen raya, harga beras untuk semua jenis biasanya turun harga Rp300 - Rp500 per kg dari harga normal.

Fluktasi harga tersebut dilain pihak merupakan konsukuensi pasar agar menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Bulog. Oleh sebab itu kajian ini di fokuskan pada upaya melihat dan menganalisis peran Bulog untuk stabilisasi harga pangan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka formulasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bulog dalam upaya stabilisasi harga pangan di Bulog Subdevere Panaikang Kota Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Bulog Dalam Upya Stabilihsasi Harga Pangan di Bulog Subdivere Panaikang Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi peran Bulog dalam upaya Stabilisasi Harga Pangan
2. Dapat memberikan informasi tambahan di bidang pertanian khususnya ruang pelayanan Bulog Subdeverve Panaikang Kota Makassar, mengenai Peran Bulog Dalam Upaya Stbilisasi Harga Pangan yang dapat berguna bagi petugas Bulog Subdeverve dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Dapat bermanfaat bagi Peneliti untuk mengetahui Peran Bulog Dalam Upaya Stabilisasi Harga Pangan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Peranan**

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Adapun pengertian lain tentang peranan. Peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranan atau kewajiban-kewajibannya.

Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi

sesuatu yang lain Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia<sup>8</sup> menjalankan suatu peranan.

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcemen, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif. Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukan dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri
3. Peran Pasif. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok

---

<sup>7</sup> (Soerjono Soekanto, 2002. EDY Sohardono, 1994. dan Jack C. Robert E. dll. 1996, Tiori Peranan, Jakarta Bumi Aksara, hal 234. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 9-30. Kamus Analisis Politik, Jakarta: Rajawali, hal. 226. Diakses dari [https://id.scribd.com/doc/313831032/ Konsep-Peran](https://id.scribd.com/doc/313831032/Konsep-Peran)).

sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## **B. Pengertian Bulog**

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah. bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

### **a. Peranan Perum Bulog**

Peranan Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan public (pengadaan dalam negeri, penyaluran beras bersubsidi, operasi stabilisasi harga, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah) telah terbukti memberikan manfaat, baik ekonomis maupun non-ekonomis yang sangat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani, melindungi rumah tangga berpendapatan



rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan sosial.

Penyediaan yang cukup, merata dengan harga yang terjangkau serta akses pangan yang memadai merupakan keharusan untuk menjamin ketahanan pangan. harus terwujud akses pangan yang terjangkau secara fisik di lokasi yang terdekat dengan individu atau rumah tangga yang membutuhkan dan terjangkau secara ekonomi oleh kemampuan ekonomi individu atau rumah tangga berpendapatan rendah. penyediaan dan akses pangan tersebut juga harus selalu terjamin dan terkendali baik jumlah maupun<sup>9</sup> harganya setiap saat dan di setiap tempat.

- b. Tugas Pelayanan publik BULOG meliputi beberapa hal, yaitu:
  - 1. Menjaga harga di tingkat petani dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah).
  - 2. Menjaga kecukupan stok untuk kegiatan operasional rutin.
  - 3. Mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk mengatasi.
- c. keadaan darurat dan program stabilisasi harga.
  - A. Mengelola penyebaran stok yg merata di seluruh negeri, dan
  - B. Mengelola pendistribusian RASKIN kepada rumah tangga sasaran berpendapatan rendah.

---

<sup>9</sup> Diakses dari : [https://id.wikipedia.org/wiki/^\(\"Tokoh\\_Bulog:\\_Bustanil\\_Arifin\".Bulog. Diakses tanggal 22 November 2008. Wardhani, Meidita Kusuma.. / Badan\\_Urusan\\_Logistik\).](https://id.wikipedia.org/wiki/^(\)

### **C. Pengertian Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wage good*), lingkungan

(menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan social politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan).beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber peningkatan produksi dalam negeri.pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar.Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.

#### **D. Bulog dalam Pilar Ketahanan Pangan**

Pemerintah senantiasa menjaga ketahanan pangan setiap rumah tangga salah satunya melalui komoditas beras terutama untuk rumah tangga miskin.dari sisi ketersediaan, pemerintah melalui Inpres memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil produksi petani melalui penyerapan/pengadaan perum bulog sehingga petani memiliki semangat untuk terus memproduksi. produksi akan memperkuat ketersediaan beras dalam negeri tanpa tergantung adanya impor.

Dari sisi keterjangkauan, pemerintah telah menyediakan beras di setiap rumah tangga dengan harga terjangkau, bagi rumah tangga miskin. program raskin tersedia di dekat rumah tangga miskin dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar. sedangkan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga, pemerintah melalui perum bulog telah melakukan pemerataan stok dengan tersedianya beras di setiap gudang perum bulog di Indonesia. dalam UU No.18/2012 tentang pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hal ini dapat diartikan bahwa ketahanan pangan tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar seperti yang dilakukan oleh sebagian negara maju dan liberal. Apabila hal ini ditempuh maka dapat berakibat buruk pada kelompok miskin yang jumlahnya masih dominan. Keberadaan masyarakat miskin tersebut terpecah di seluruh wilayah Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi.

Dengan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, masyarakat yang rawan pangan tersebut dapat terlindungi dengan baik. Sejumlah negara di Asia juga memberlakukan berbagai kebijakan guna;

1. Melindungi petani produsen perum Bulog dalam ketahanan pangan
2. Konsumen ataupun keduanya secara simultan baik melalui fungsi penetapan HPP, penyediaan penyaluran/distribusi pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen.

Meskipun terdapat perbedaan status lembaga operator yang melaksanakan fungsi intervensi, namun di masing-masing lembaga tersebut secara jelas disebutkan kewajiban dan hak-hak yang diberikan kepada operator dari pemerintah yang menugaskan.

Dengan demikian, terdapat kejelasan tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh operator serta kejelasan hak-hak yang diberikan kepada lembaga operator, termasuk segala beban (biaya/anggaran) yang timbul akibat penugasan tersebut. tugas publik perum bulog merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, yang merupakan penghijauan lahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.

Ketiga tugas publik bulog tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP).

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh perum bulog. tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program raskin. sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga

---

<sup>10</sup> diakses dari: [http://www.bulog.co.id/Ketahanan\\_Pangan/ketahananpangan\\_bulog.php](http://www.bulog.co.id/Ketahanan_Pangan/ketahananpangan_bulog.php)).

stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. kegiatan ketiga dilaksanakan perum bulog dalam bentuk pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP)

## **E. Sejarah Kebijakan Harga Pangan dan Arahnya ke Depan**

### **a. Sejarah Kebijakan Harga Pangan Khususnya Komoditi Beras**

Campur tangan pemerintah dalam harga dan distribusi pangan (beras) sudah ada sejak tahun 1651 saat Pemerintahan Sultan Amangkurat I pada Kerajaan Mataram dengan tujuan melumpuhkan perdagangan VOC Belanda.

Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, kebijakan harga beras murah masih berlanjut dengan tujuan untuk mendukung produk ekspor perkebunan. pada masa pendudukan Jepang, campur tangan terhadap beras juga masih berlangsung dengan tujuan untuk mendukung logistik tentara Jepang (Sapuan, 2002).

Setelah Kemerdekaan, Pemerintah Indonesia juga campur tangan pada perberasan dengan orientasi lebih kepada konsumen. di awal kemerdekaan (1945-1950) terjadi dualisme pengurusan kebijakan penyediaan pangan. Pada daerah sentra produksi dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dan di perkotaan oleh Pemerintah Pendudukan Belanda.

Pada periode 1951-1957, pertama kali campur tangan pemerintah dalam masalah perberasan, yaitu stabilisasi harga melalui injeksi beras di pasaran. Saat itu tugas membeli dan menetapkan harga dilakukan

oleh Bupati yang berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Menteri perekonomian. untuk pelaksanaan di tingkat daerah sentra produksi dibentuk Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang bertugas mengumpulkan padi, mengolah dan mendistribusikan pada konsumen. Di tingkat pusat dibentuk Yayasan urusan bahan makanan yang bertugas menampung kelebihan beras hasil pembelian YBPP dan menyalurkan ke daerah defisit serta bertugas mengimpor beras (Sapuan, 2002).

Sejak reformasi dan adanya kesepakatan WTO, terjadi perubahan dimana pemerintah lebih membuka ekonomi terhadap pasar global dan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. pada masa ini kebijakan pangan nasional telah kehilangan arah dan tidak adanya institusi yang mampu mengintegrasikan keseluruhan aspek kebijakan pangan (Widodo, 2003). Khusus untuk beras, paket kebijakan ekonomi beras yang telah dioperasionalkan pada Era Orde Baru secara bertahap dihilangkan, sehingga tidak efektif lagi (PSE, 2003).

Sejak akhir tahun 1998, unsur-unsur penopang kebijakan ekonomi beras yang dihilangkan adalah (Sapuan, 2002 dan PSE, 2003):

- a. Tahun 1998 mencabut monopoli impor beras yang dimiliki Bulog. pihak swasta dilibatkan dalam impor beras yang diikuti dengan kebijakan tarif impor beras. namun kebijakan ini tidak efektif, karena adanya moral hazard.

---

<sup>12</sup> diakses dari: [http://www.bulog.co.id/Ketahanan\\_Pangan/ketahananpangan\\_bulog.php](http://www.bulog.co.id/Ketahanan_Pangan/ketahananpangan_bulog.php)).

- b. Akhir 1998 menghapus berbagai subsidi input sehingga meningkatkan biaya usahatani, sehingga petani mengharapkan menerima harga gabah yang tinggi.
- c. Akhir tahun 1999 menghapus dana KLBI bagi Bulog dan koperasi. selanjutnya menggunakan kredit komersil, sehingga membatasi kemampuan lembaga tersebut melakukan pengadaan pangan dari produksi domestik.
- d. Tahun 2000 menghapus captive market Bulog berupa jatah beras bagi PNS, sehingga outlet dan kemampuan Bulog menyerap surplus produksi beras terbatas. Terakhir, sejak Mei 2003 status Bulog diubah dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Perusahaan Umum.

Operasi pasar beras juga mengalami perubahan. sejak tahun 1969-1998 subsidi yang diberikan untuk semua lapisan masyarakat. awal sampai pertengahan 1998 diberikan untuk daerah tertentu dalam bentuk Operasi Pasar Murni (OPM). kemudian sejak Juni 1998 sampai sekarang hanya diberikan untuk target grup masyarakat miskin dalam kegiatan Operasi Pasar Khusus (OPK).

Menurut : St. Rachaeni (2014,2015). bahwa salah satu kebijakan pertanian adalah kebijakan harga dapat di pakai untuk mencapai tiga tujuan.

- a. stabilitas harga hasil-hasil pertanian terutama pada tingkat petani
- b. meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar (term



of trade)

- c. memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pengeluaran produksi pertanian antara lain kebijakan harga dasar (Floor Price) dan harga atap (Sell Price) pada gabah dan beras.

#### **F. Faktor-faktor yang Menentukan Efektivitas Kebijakan Harga Pangan**

Peran pemerintah direpresentasikan oleh besarnya biaya yang digunakan untuk implementasi kebijakan harga pangan. Semakin besar dana yang digunakan maka seharusnya ketahanan pangan semakin membaik. Namun, karena implementasi kebijakan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, maka selain konsep dan dana banyak aspek teknis yang juga menentukan efektivitas kebijakan harga pangan. Menurut Mooy (2005) sejak dulu Bank Indonesia sudah memperhatikan masalah pertanian dan pengusaha kecil dalam bentuk program BIMAS, Kredit Canda Kulak, KUT.

Namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kegagalan tersebut selalu dikatakan disebabkan oleh konsep yang salah. Kemudian muncul konsep baru yang ternyata juga mengalami kegagalan. Jadi masalah sebenarnya adalah kegagalan di tingkat implementasi. Bisa saja konsepnya baik, tapi implementasinya mengalami banyak hambatan, moral hazard, salah penggunaan, tidak tepat waktu, dll. Dengan demikian efektivitas kebijakan perlu perhatian sampai pada tataran implementasi.

Secara umum sasaran kebijakan pangan adalah

- a. Meningkatkan<sup>13</sup> kan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani, mengendalikan kecukupan pangan sehingga tersedia di seluruh wilayah, dalam waktu dan jumlah, serta dalam batas harga yang terjangkau masyarakat, memperbaiki mutu produksi pangan.
- b. Efektivitas suatu kebijakan yang diukur dari keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh bagaimana proses pembuatan dan implementasi kebijakan dilaksanakan (PSE, 2003).

#### **G. Dampak Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan**

Pasca swasembada beras 1984, terjadi pengurangan investasi di sektor pertanian (irigasi dan pembukaan areal pertanian baru) dan penghapusan subsidi harga sarana produksi pertanian secara bertahap menyebabkan laju pertumbuhan produksi melambat dan menjelma menjadi faktor risiko utama terhadap ketahanan pangan nasional, pendapatan petani serta akan berdampak pada perekonomian dan stabilitas sosial politik (Kasryno et al., 2001).

Menurut Hermanto (2002), gejolak harga beras berdampak negatif terhadap daya beli konsumen dan petani produsen (berstatus net-consumer) dan menghambat rumah tanggatersebut untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. karena itu stabilisasi harga beras merupakan salah satu penentu tercapainya ketahanan pangan.

---

<sup>13</sup> (3.Nyak Ilham, Harmanto Siregar, dan D. S. Priyarsono. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161. Fakultas Ekonomi dan Manejemen IPB, Bogor.).

Dengan teknik SWOT untuk melihat kinerja kebijakan stabilisasi harga Saliem et al.(2004) menyimpulkan bahwa kebijakan stabilisasi harga dengan instrumen HDG dan HDPP tidak efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani yang berarti juga tidak efektif meningkatkan ketahanan pangan.

Ketidak efektifan tersebut disebabkan oleh pengaruh eksternal berupa penurunan harga beras di pasar internasional dan mel<sup>14</sup>emahnya nilai tukar dan pengaruh faktor internal disebabkan kurang memadainya infrastruktur produksi dan pemasaran sehingga disparitas harga gabah terhadap harga beras meningkat.

Peningkatan disparitas harga tersebut mencerminkan margin pemasaran yang diterima petani semakin rendah, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani menjadi sulit di upayakan. dari analisis di atas, berkurangnya infrastruktur produksi dan pemasaran pertanian serta pengurangan subsidi input berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Dampak tersebut dapat dikurangi dengan kenaikan harga output secara proporsional.

Dengan infrastruktur dan subsidi input yang berkurang serta semakin terbukanya pasar menyebabkan upaya kebijakan harga dengan instrumen HDG dan HDPP tidak efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan.

---

<sup>14</sup> (3.Nyak Ilham, Harmanto Siregar, dan D. S. Priyarsono. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161. Fakultas Ekonomi dan Manejemen IPB, Bogor.).

## H. Manfaat Stabilisasi Harga Pangan

Menurut Timmer (1996) dan Dawe (1995) biaya yang dikeluarkan untuk menstabilkan harga seharusnya tidak hanya dinilai dari segi untung/rugi sebuah perusahaan, akan tetapi harus dilihat kaitannya dengan kestabilan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, investasi disektor beras, investasi di sektor terkait lainnya, hankam, politik dan aspek sosial lainnya. Termasuk ketahanan pangan yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia dan tercapainya pembangunan nasional.

Menurut Amang dan Sawit (2001), ada tiga alasan perlunya dilakukan stabilisasi harga pangan:

- a. Ketidakstabilan harga pangan dapat mengurangi minat investasi pada tingkat usahatani dari seharusnya, sebab petani tidak terangsang menggunakan teknologi baru dan alat-alat pertanian. Akibat selanjutnya menurunkan investasi pada kegiatan pemasaran dan pengolahan
- b. Sektor industri amat berkepentingan atas stabilisasi harga pangan karena amat terkait dengan upah tenaga kerja. Jika pangan cukup maka produktivitas tenaga kerja tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi suatu perusahaan. stabilnya harga pangan akan mendorong investasi jangka panjang. selain itu stabilnya harga pangan terkait dengan stabilitas politik, sehingga mendorong peningkatan investasi dan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

c. Konsumen mengalami kerugian apabila harga pangan tidak stabil. terutama kelompok pendapatan rendah, sebab mereka lebih peka terhadap perubahan harga pangan. Jika ini terganggu akan mudah memicu berbagai kekerasan sosial yang mengganggu stabilitas politik. Pengalaman selama ini (Malari 1975 dan Krisis Ekonomi 1978) cukup besar kerugian<sup>15</sup> akibat dari kerusuhan yang ditimbulkan oleh kekerasan sosial).

<sup>1</sup> (3. Nyak Ilham, Harmanto Siregar, dan D. S. Priyarsono. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor.).

---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Penentuan Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Perum Bulog Subdivere Panaikang Kota Makassar. Penentuan tempat ini dilakukan secara study kasus, dengan pertimbangan tempat ini merupakan wilayah yang dapat dijangkau dilihat dari adanya akses dan biaya untuk mendapatkan data dapat optimal akan dilaksanakan pada Bulog Subdivere Kota Makassar pada Bulan Juni Tahun 2017.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Penentuan responden dilakukan secara stratifikasi sampling, responden dipilih. stratifikasi responden sampling dibutuhkan kepada Subdivere Bulog Panaikang minimal 3 orang andai 5 orang sampel responden menjadi 8 Orang. diinforman dari dinas pertanian subdivere panagan: kepala dinas pertanian Sulawesi selatan (SULSEL) di tujukan ke staf dan kantor Bulog Sibdivere Panaikang.

#### **C. Jenis Data**

Data yang diambil dari penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan BPS

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil wawancara terstruktur secara langsung dengan masyarakat atau karyawan perusahaan (Bulog Subdivere Panaikang Makassar)

dengan menggunakan qusioner (daftar pertanyaan) yang telah disiapkan. Disamping itu dilakukan pula pengamatan/survey langsung di lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh melalui study literatur berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian seperti dari laporan instansi terkait bulog subdevere Panaikang Makassar, laporan penelitian terdahul, buku, internet, dan sumber informasi ilmiah lain yang di anggap relevan.

**D. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informasi. di identifikasi memuat berbagai peran bulog dan stbilisasi harga komersial di analisis secara deskritif.

Adapun peran bulog dalam upaya stabilisasi harga beras

1. Mekanisme kebijakan harga
2. Pengadaan atau pembeli beras dalam negri
3. Penyaluran atau distribusi beras rendah
4. Operasi stbilisasi harga
5. Mengelola dan menjaga cadangan beras
6. Menjaga harga HPP
7. Pengelolahan penyebab stok yang merata

## E. Konsep Operasional

1. Peranan adalah Melakukan kegiatan-kegiatan atau cara dengan pengharapan manusia terhadap metodenya, individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.
2. Peranan Bulog dalam stabilisasi harga adalah memperluas kegiatan pelaksanaan tugas Bulog dalam berbagai upaya menjaga tiga pilar ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilisasi harga.
3. Harga dasar (Floor Price) beras adalah (Rp/Kg) : Dampak Harga Analisis untuk mengukur dampak harga dasar gabah (diwakili oleh Gabah Kering Giling = GKG) terhadap harga jual gabah (GKG) di tingkat produsen (petani). persamaan logaritma ganda (1) berikut :
$$\text{HPG} - \text{KGHD} - \text{GKG01} = \text{Harga atap (Jelliup Price) beras adalah (Rp/Kg):}$$
Price Ceiling atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Price Ceiling efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak harga yang tak terhingga.
4. Stabilisasi harga beras adalah Stabilitas Harga Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur stabilitas harga adalah koefisien variasi harga yang bersangkutan. Makin besar koefisien variasi berarti harga makin tidak stabil.



5. Mekanisme Kebijakan Harga Price Floor (Harga Dasar) dan Price Ceiling (Harga Tertinggi) merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar, yang bertujuan untuk mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar.
6. Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dilaksanakan sebagai program darurat untuk merespon krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu.
7. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya
8. HPP Harga Pokok Penjualan (HPP) merupakan salah satu elemen penting dari laporan laba-rugi suatu perusahaan dagang. Yang dimaksud dengan HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual.
9. Stok Pangan Sekilas CBPC cadangan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi ketahanan pangan suatu negara, termasuk negara Indonesia yang bersifat agraris. Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

yang dikelola oleh BULOG, menyatu dengan stok BULOG dan dapat diakses di setiap gudang BULOG di seluruh Indonesia oleh Pemerintah.



## BAB IV

### DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

#### A. Deskripsi Tempat Penelitian

##### a. Sejarah Pada Bulog Subdevire

Sejarah Singkat Perusahaan Umum (Perum) BULOG Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi

Pemerintahan baru Selanjutnya direvisi melalui Keppres No.39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilitasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No.39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas.

Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No.103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koodinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Pada

tahun 1995, keluar Keppres No.50, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilitasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.

Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres Utara No.45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula.

Kemudian melalui Keppres No.19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No.39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No.19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF

yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No.29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya.

Pada Keppres No.29 tahun 2000 tersebut tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No.166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No.103/2000.

Kemudian diubah lagi dengan Keppres No.03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan

ketentuan dalam Keppres No.29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan member waktu masa transisi sampai dengan tahun 2013. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

b. Jenis Usaha/Kegiatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah sebuah lembaga pemerintah yang menangani bahan pangan pokok khususnya beras.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Nasional.

c. Visi dan Misi Perusahaan Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Visi :

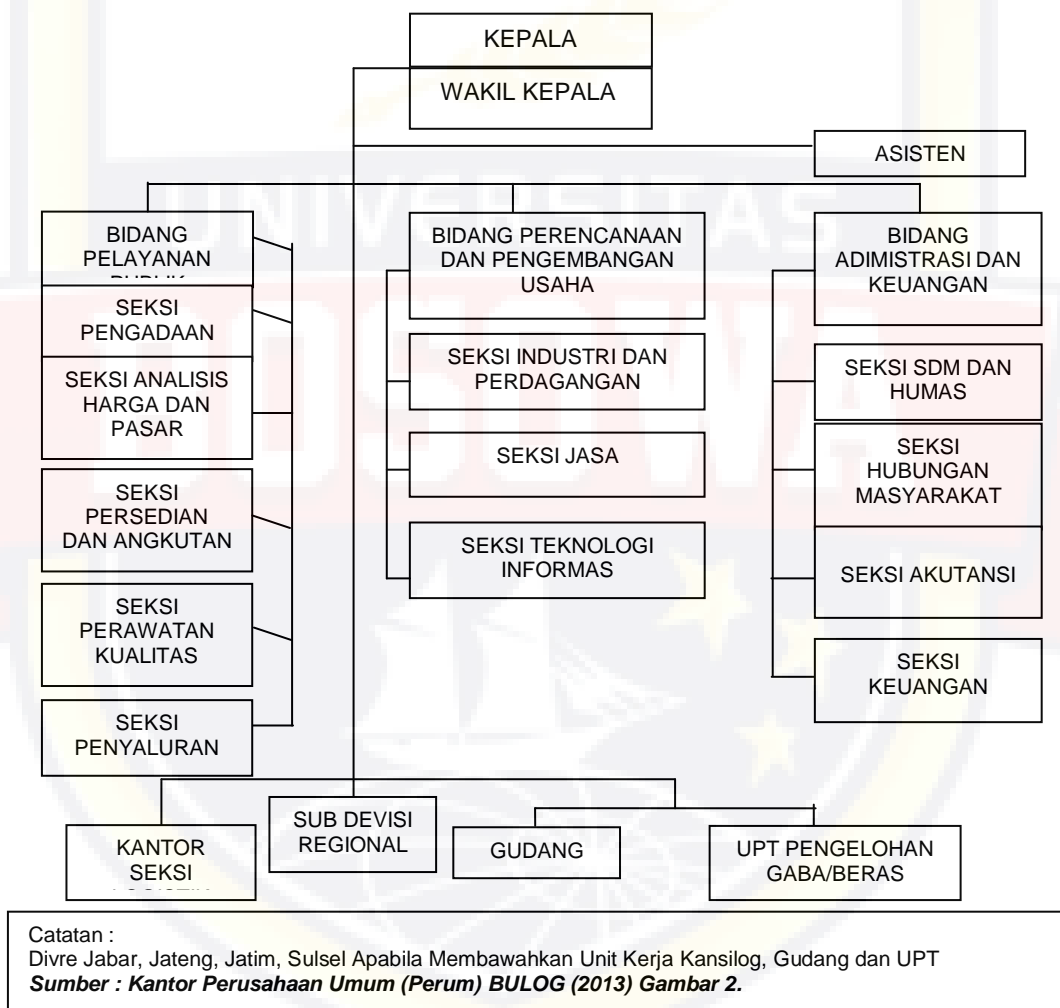
Menjadi lembaga pangan yang handal untuk menetapkan ketahanan pangan nasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan nasional.
2. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi dibidang pangan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada perekonomian nasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi dibidang pangan dan usaha lain secara berkelanjutan dan bermanfaat kepada stakeholders.

4. Menjalankan usaha dalam bidang produksi pemasaran dan jasa dibidang komoditi pangan guna mendukung program pengembangan hasil pertanian khususnya pangan dan bidang lainnya dengan upaya memaksimalkan produktivitas, efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba.

d. Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum, 4.1) BULOG



e. Job Description Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Tugas pokok masing-masing bagian di Perusahaan Umum (Perum) BULOG Divisi Regional Sumatera Utara adalah sebagai

berikut :

1. Kepala, memiliki tugas yaitu :

- a. Memimpin Divisi Regional sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membina sumber daya Perum BULOG dilingkungan Divisi Regional.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan.

2. Asisten

Berdasarkan pertimbangan beban kerja dan kebutuhan keahlian bidang tertentu, maka Kepala Divisi Regional dapat dibantu oleh seorang atau beberapa Asisten Divisi Regional. Asisten Divisi Regional memiliki tugas membantu Kepala Divisi Regional dibidang keahlian tertentu dengan menyelenggarakan pengolahan, dan pengkajian terhadap masalah-masalah sesuai bidang penugasan baik atas inisiatif sendiri maupun atas petunjuk Kepala Divisi Regional. Asisten berada dibawah tanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Regional.

3. Bidang Pelayanan Publik memiliki tugas yaitu :

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan gabah atau beras.
- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan



pemantauan analisa harga pasar.

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan persediaan dan angkutan.

d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perawatan kualitas dan pemberantasan hama serta pengolahan komoditi pangan.

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan penyaluran beras kepada kelembagaan pemerintah serta masyarakat umum dan khusus.

4. Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki tugas yaitu

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan administrasi sumber daya manusia, urusan hukum dan klaim.

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan surat menyurat, arsip, ekspedisi, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan dan pengolahan, pengadaan, pemeliharaan, perlengkapan sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan dan investaris serta penghapusan.

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan.

d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan anggaran administrasi pembayaran verifikasi.

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi pembukuan, neraca, laporan pertanggung jawaban keuangan dan hubungan rekening antar kantor (RAK).

5. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha memiliki tugas yaitu:

a. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi dibidang industri, perdagangan, dan jasa serta teknologi informasi.

6. Bagian Sumber Daya Manusia dan Hukum memiliki tugas yaitu:

1. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sumber daya manusia.

2. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi dan tata laksana.

3. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan hukum.

4. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan kelompok jabatan fungsional legal officer.

7. Bagian Tata Usaha dan Umum memiliki tugas yaitu :

a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan urusan pelayanan.

b. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan kerumahtanggaan.

c. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan sarana subdivisi regional.

8. Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) memiliki tugas yaitu :

a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan hubungan kelembagaan dan corporate governance.

b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan citra dan media massa.

c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan Kepala Divisi Regional.

f. Kegiatan Terkini Perusahaan Umum (Perum) BULOG

1. Public Service Obligation (PSO).

a. Penyaluran beras berdasarkan Printah Logistik (Prinlog).

a) Beras untuk Bina Tuna Warga (BTW) atau Lembaga Pemasyarakatan.

b) Beras untuk TNI/Polri (Pendidikan, dll).

c) Beras transmigrasi.

b. Penyaluran beras Non Prinlog.

- a) Melaksanakan operasi pasar beras ketika diperlukan.
- b) Mendistribusikan beras kepada masyarakat miskin (Raskin) atas Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah.

2. Komersial.

- a) Perdagangan komoditi bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, dan lain lainnya melalui BULOG .
- b) Perdagangan komoditi palawija (beras, gula pasir, jagung, kopi, cabai merah (bila diperlukan) melalui Bidang Komersil Perum BULOG.

1) Pembeli atau Produksi Bulog Subdevire Makassar Panaikang Pembelian atau Produksi Gaba/Beras yang dilakukan oleh Bulog Subdevire Panaikang, Dalam hal ini Bulog Panikang Melakukan kerjasama dengan empat Kabupaten Kota. Diantaranya Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa.

2) Operasi Pasar yang dilakukan oleh Bulog Subdevire Makassar Panaikang, sebagai berikut :

- a. Survey
- b. Pengadaan

## B. Sarana dan Prasarana pada Bulog Subdivisi Panaikang Makassar

### a. Sarana

#### 1. Kemitraan Kerja

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok pangan yang cukup terutama beras untuk kebutuhan penyaluran di seluruh wilayah Indonesia dan turut berperan serta dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat/lingkungan sekitar, maka Perum BULOG Makassar membuka Program Kemitraan melalui

#### 2. Mitra Kerja Pengadaan (MKP) Dalam Negeri

Mitra Kerja Pengadaan selanjutnya disebut MKP adalah perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras dan pangan lainnya. Landasan Kemitraan antara Perum BULOG dengan Mitra Kerja Pengadaan Dilaksanakan berdasarkan pada :

- a) Komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan Kemitraan Pengadaan Pangan DN sesuai sasaran yang ditentukan.
- b) Tujuan bersama memenuhi target Pengadaan Pangan DN sesuai Instruksi Presiden RI tentang Kebijakan Perberasan Nasional yang berlaku dan kebijakan pangan lainnya.
- c) Berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu tertentu

disesuaikan dengan kondisi industri pangan nasional

### Persyaratan MPK

#### c. Persyaratan Administrasi

1. Memiliki dokumen yang sah sebagai berikut:

- a) Surat Permohonan Menjadi MKP ditujukan kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
- b) Akta Notaris pendirian perusahaan bagi MKP yang berbadan hukum atau badan usaha
- c) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e) Surat Keterangan Tidak Mengganggu Lingkungan (HO)
- f) Surat Ijin Usaha Penggilingan Padi dan/atau Penyosohan Beras (sesuai perijinan daerah masing-masing)
- g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), bagi MKP yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- h) Kontrak atau Surat Kuasa yang dinotariskan dari pemilik penggilingan, bagi yang tidak memiliki tetapi menguasai sarana penggilingan

2. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus masih berlaku dan dokumen yang habis masa berlakunya harus dilampiri surat keterangan dalam proses dari instansi yang berwenang.

3. Dalam rangka pembinaan, bagi calon MKP yang belum memiliki

kelengkapan administrasi, dapat diikutsertakan proses seleksi sebagai MKP. MKP yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi persyaratan administrasi dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Calon MKP hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) nama perusahaan dalam 1 (satu) wilayah Divre Operasional atau Subdivre/Kansilog
5. Calon MKP dapat mengajukan permohonan sebagai MKP di wilayah Subdivre lainnya dalam satu wilayah kerja Divre dengan syarat memiliki sarana penggilingan, pengolahan dan persyaratan teknis lainnya di wilayah Subdivre dimaksud
6. Dalam rangka pemenuhan persediaan pangan, MKP dapat melakukan pengadaan di luar Wilayah kerja Divre/Subdivre/Kansilog dimana MKP tersebut terdaftar dengan tetap memprioritaskan melaksanakan pengadaan di wilayah asal MKP

d. Persyaratan Teknis

- 1) Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana Pengeringan gabah, yaitu:
  - a) Lantai Jemur dan/atau
  - b) Pengering Mekanis
- 2) Memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana dan prasarana pengolahan padi, sekurang-kurangnya yaitu:

- a) Mesin Pemecah Kulit
  - b) Mesin Penyosoh
  - c) Alat Pemisah Beras (grader) atau Ayakan
- 3) Sarana lain yang diharapkan dimiliki MKP:
- a) Mesin Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit.
  - b) Pemisah batu (destoner)
  - c) Mesin Pemisah warna (colour shorter)
- 4) Khusus untuk MKP komoditi pangan lainnya, memiliki dan/atau menguasai secara sah sarana prasarana pengolahan pangan dimaksud dan pendukung lainnya
- e. Persyaratan Administrasi dan Teknis
1. Surat Permohonan menjadi MKP, ditujukan kepada Kadivreg Kasubdivreg Kakansilog.
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
  3. Daftar Nama dan Alamat petani Anggota Poktan/Gapoktan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat oleh Pengurus Poktan/Gapoktan.
  4. Keterangan lokasi dan luas lahan yang dikuasai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kecamatan setempat.
  5. Poktan/Gapoktan yang telah memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan/pengolahan dapat diikutkan dalam pengadaan gabah, beras, kedele, dan jagung.



6. Poktan/Gapoktan yang belum memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan dan pengolahan pangan lainnya hanya diikuti dalam pengadaan gabah

f. Prasarana

1) Klasifikasi

Klasifikasi MKP dilakukan untuk MKP gabah/beras berdasarkan kelengkapan dan kapasitas sarana dan prasarana pasca panen yang dimiliki/dikuasai MKP. MKP diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) Kelas, yaitu Kelas A, Kelas B dan Kelas C. Untuk MKP jagung dan kedelai serta pangan lainnya tidak dilakukan klasifikasi.

Syarat Minimal	MKP Kelas A	MKP Kelas B	MKP Kelas C/Poktan/Gapoktan
<b>Pengeringan</b>	Kapasitas minimal 30 ton GKG per hari Sarana berupa lantai jemur atau pengering mekanis	Kapasitas minimal 20 ton GKG per hari Sarana berupa lantai jemur atau pengering mekanis	Kapasitas minimal 5 ton GKG per hari Sarana berupa lantai jemur
<b>Mesin Pembersih Gabah</b>	Kapasitas minimal 30 ton per hari Sarana berupa pre-cleaner atau seed cleaner	Kapasitas minimal 20 ton per hari Sarana berupa pre-cleaner atau seed cleaner.	-
<b>Penggilingan/Rice Milling Plant (RMP)</b>	Kapasitas lebih dari 3 ton GKG per jam terdiri dari: <i>Seed Cleaner, Double Polisher, Colour Shorter, Grader, Packaging</i> dan <i>Packaging</i> sebaiknya diharuskan)	Kapasitas 1 ton sampai dengan 3 ton GKG per jam Rangkaian Mesin terdiri dari: <i>Seed Cleaner, Husker, Paddy Separator, Destoner, Double Polisher, Colour Shorter, Whitener, Grader, Packaging</i>  (untuk <i>Colour Shorter, Whitener</i> dan <i>Packaging</i> sebaiknya ada tetapi tidak diharuskan)	Kapasitas sampai dengan 1 ton GKG per jam Rangkaian Mesin terdiri dari: <i>Husker, Polisher, Ayakan beras manual, Timbangan</i> dan mesin jahit
<b>Sarana Penyimpanan</b>	Kapasitas penyimpanan minimal 3.000 ton Bentuk bangunan berupa Gudang Konvensional atau	Kapasitas penyimpanan minimal 2.000 ton Bentuk bangunan berupa Gudang Konvensional	Kapasitas penyimpanan minimal 100 ton Bentuk bangunan

Syarat Minimal	MKP Kelas A	MKP Kelas B	MKP Kelas C/Poktan/Gapoktan
	SILO	atau SILO	berupa Gudang atau ruangan menyatu dengan bangunan RMU
<b>Sarana Angkutan</b>	Kapasitas angkutan minimal 50 ton Jenis alat angkut truk minimal 5 unit	Kapasitas angkutan minimal 30 ton Jenis alat angkut truk minimal 3 unit	-
<b>Kelengkapan Pemeriksaan Kualitas</b>	Laboratorium Kecil (mini lab) ada dengan disediakan ruangan khusus Peralatan survey terdiri dari: Alat Ukur Kadar Air (Moisture Tester) Grain Analyst Tester (GAT) Ayakan butir patah dan menir Memiliki petugas pemeriksa kualitas (Quality Control)	Peralatan survey terdiri dari: Alat Ukur Kadar Air (Moisture Tester) Grain Analyst Tester (GAT) Ayakan butir patah dan menir Memiliki petugas pemeriksa kualitas (Quality Control)	-

(Tabel 4.2)

## 2) Indikator Penilaian Kinerja MKP

- a. Kontribusi MKP dalam pencapaian target pengadaan Divre Operasional/Subdivre/Kansilog
- b. Kualitas Beras
- c. Peningkatan Kuantum Pasokan MKP
- d. Pembinaan petani di wilayah kerja MKP

## 3) Lokasi Pengajuan dan Informasi

Untuk proses pengajuan dan informasi lebih lanjut, MKP/Poktan/Gapoktan dapat menghubungi Divre (propinsi) atau Subdivre (kabupaten) Perum Bulog yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

#### **4) On-Farm**

Program kemitraan On-Farm diselenggarakan dalam rangka kegiatan pengembangan usaha guna memberikan kontribusi bagi perusahaan dan mendukung kegiatan pelayanan public serta mensukseskan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan program kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional

a. Kegiatan On-Farm dilaksanakan dengan Pola sebagai berikut:

1. On-Farm Mandiri, yaitu kegiatan usaha tani yang terdiri dari:

a) On-Farm Mandiri BULOG, yaitu kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh Perum BULOG di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain.

b) On-Farm Mandiri Petani, yaitu kegiatan usaha tani yang didanai dan dikelola oleh Mitra Kerja On-Farm di lahan milik sendiri dan/atau lahan sewa milik pihak lain, dan Perum BULOG dapat melakukan pendampingan serta membeli hasil panennya

#### **5) On-Farm Kemitraan**

Yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum BULOG dan Mitra Kerja On-Farm, dengan kewajiban Perum BULOG memberikan paket pinjaman Saprodi, dan kewajiban Mitra Kerja On-Farm membayar kembali setelah panen

## 6) On-Farm Sinergi

Yaitu kegiatan kerjasama usaha tani antara Perum BULOG, Mitra Kerja On-Farm, dan pihak Perbankan atau Distributor Saprodi, dengan kewajiban Perbankan menyediakan pembiayaan usaha tani atau Distributor Saprodi menyediakan Saprodi, dengan jaminan dari Mitra Kerja On-Farm, dan Perum BULOG dapat membeli hasil panennya

### C. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu sumber daya penting bagi Perum BULOG, karena dengan sumber daya manusia yang handal akan memberi kontribusi yang besar bagi perusahaan.

1. Kepegawaian Bulog Subdivere Panaikang terdiri dari Pegawai Negri Badan Usha Milik Negara (BUMN).
2. Kepegawaian Bulog Subdevere Panaikang Terdiri dari 43 pegawai antara lain :

Tabel 4.3 Kepegawaian Bulog Subdevire Makassar Panaikang:

No	Keterangan	Jumla Pegawai
1	Kepala	1. Orang
2	Wakil Kepala	1. Orang
3	Seksi Gasar dan Pengadaan	4. Orang
4	Seksi Operasional dan Pelayanan Publik	4. Orang
5	Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis	4. Orang

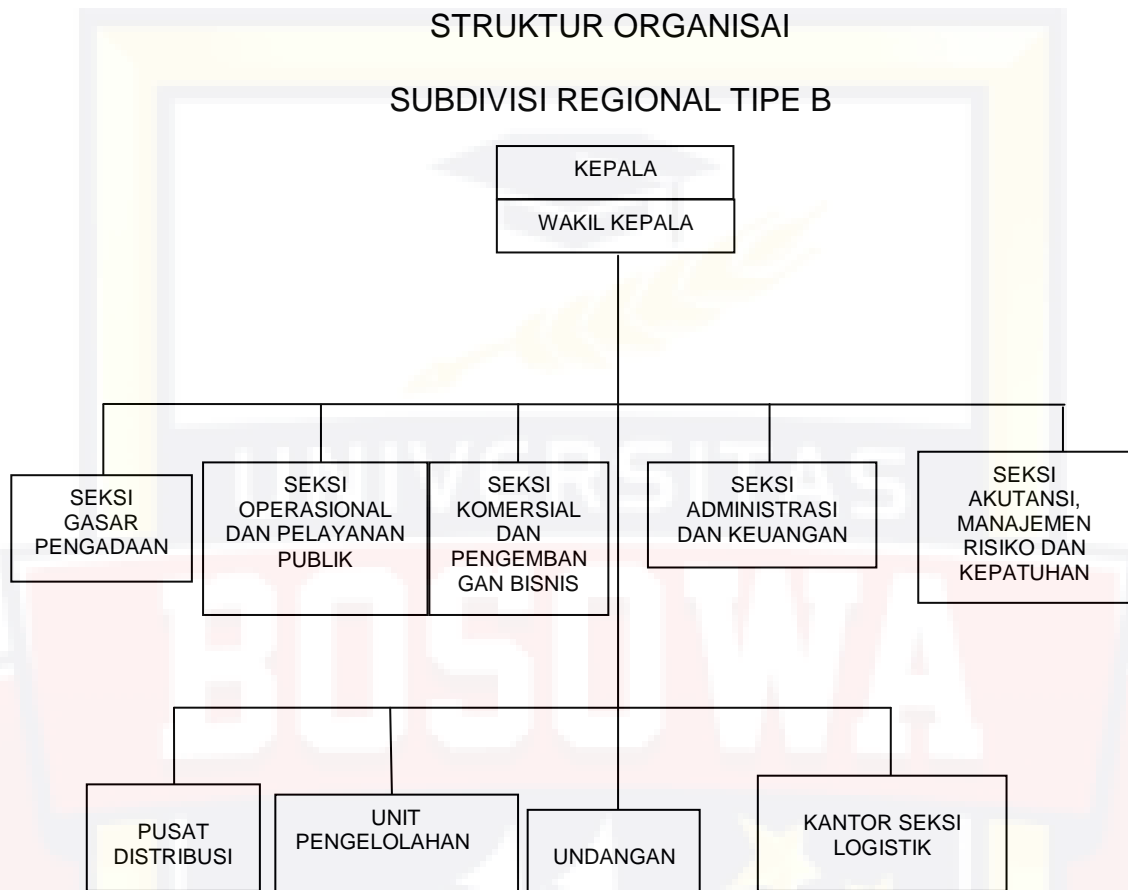
6	Seksi Adiministrasi dan Keuangan	4. Orang
7	Seksi Akutansi Menajemen Risiko dan Kepatuhan	3. Orang
8	Pusat Distribusi	3. Orang
9	Unit Pengolahan	2. Orang
10	Gudang	14.Orang
11	Kantor Seksi Logistik	3. Orang
	Total Pegawai	43 Orang

b. Perum Bulog setiap saat membutuhkan para kandidat pilihan mulai dari tingkat SMK hingga D3 dan S1. Untuk tingkatan SMK, bidang keahlian yang dibutuhkan adalah Teknik Mesin dengan jurusan:

1. Teknik Permesinan dan Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri;
2. Mekanisme Pertanian, Agribisnis Pertanian dengan jurusan:
3. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian;
4. Administrasi dengan jurusan:
5. Administrasi Perkantoran;
6. Keuangan dengan jurusan:
7. Akuntansi dan Tata Niaga dengan jurusan:
8. Pemasaran. Sedangkan untuk tingkatan D3 yang dibutuhkan adalah jurusan pemasaran, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik pertanian, teknik informatika, teknik sipil, teknik arsitektur, ilmu komunikasi, kearsipan, administrasi niaga, sekretaris, analis kimia

dan transportasi logistik.

D. Struktur Organisasi Subdivisi Regional Tipe B (Tabel 4.4)



Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Direksi,

BULOG  
Direksi

Djarot Kusumayakti  
Direktur Utam

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### H. Peran Bulog Dalam Kebijakan Harga Beras

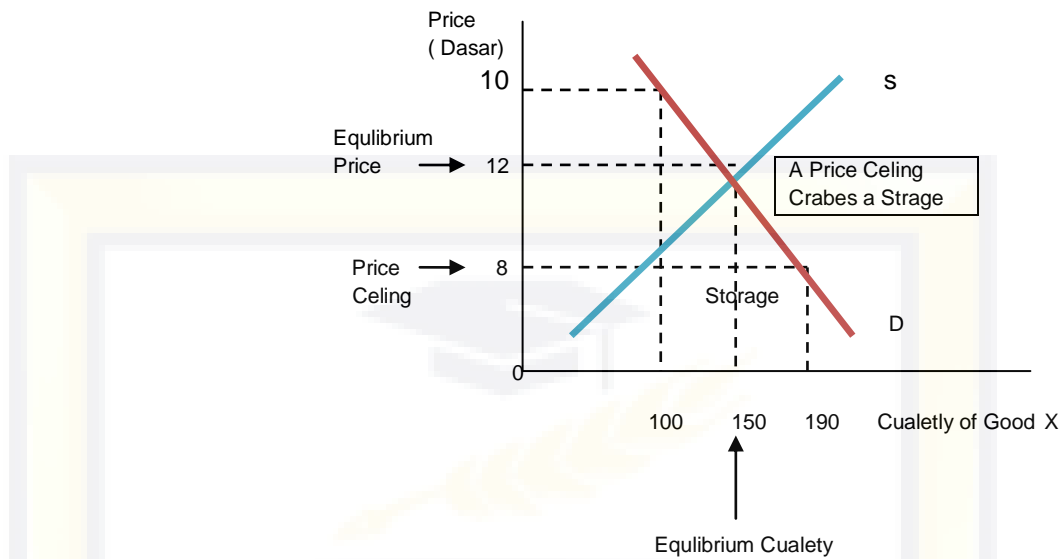
##### 1. Mekanisme kebijakan harga

###### a. Kebijakan Harga

Terkadang terjadi gejolak yang menyebabkan keadaan pasar berubah-ubah contohnya permintaan yang lebih besar daripada penawaran atau penawaran yang lebih besar daripada permintaan. Disinilah peran pemerintah sebagai penengah antara produsen dan konsumen agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Berikut ini adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatur harga keseimbangan di pasar.

###### b. Kebijakan harga atap

Kebijaka harga ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejatraan masyarakat. Nursantiysh (2009) mengatakan jika harga atap (harga maksimum) tetap di perlukan khususnya pada persediaan produksi terbatas. Dalam hal ini, jumlah permintaan ( $Q_d$ ) lebih besar dari jumlah penawaran ( $Q_s$ )



Gambar 5.1, Kurva Harga Tinggi (Prica Celing)

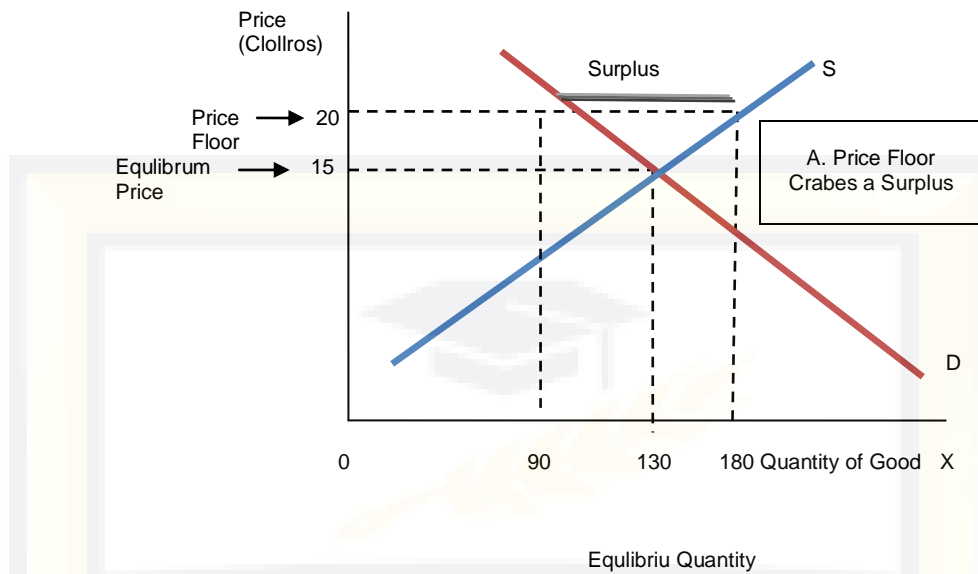
Berdasarkan Kurva diatas menenjukan bahwa harga tinggi (Prica

Celing) dapat mempengaruhi beberapa hal sebagai Berikut :

- 1) Menurunnya harga
  - 2) Menciptakan kelebihan permintaan
  - 3) Berkurangnya penawaran
  - 4) menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan (shortage)
- c. Kebijakan harga minimum (price floor)

Hall dan Lieberman (2017) mendefenisikan *a price floor is minimum amount below which the price is permitted to fall*. Kebijakan ini adalah lawan dari kebijakan harga maksimum di mana harga yang berlaku di atas dianggap terlalu rendah dan akan merugikan produsen. Dalam hal ini, jumlah penawaran ( $Q_s$ ) lebih besar dari jumlah permintaan ( $Q_d$ ) sehingga menyebabkan kondisi surplus dimana jumlah pasokan barang yang beredar di masyarakat sangat banyak.





Gambar 5.2, Kurva Harga Dasar (Price Floor)

Berdasarkan Kurva diatas menunjukan bahwa harga dasar (Price Floor) dapat mempengaruhi beberapa hal sebagai Berikut :

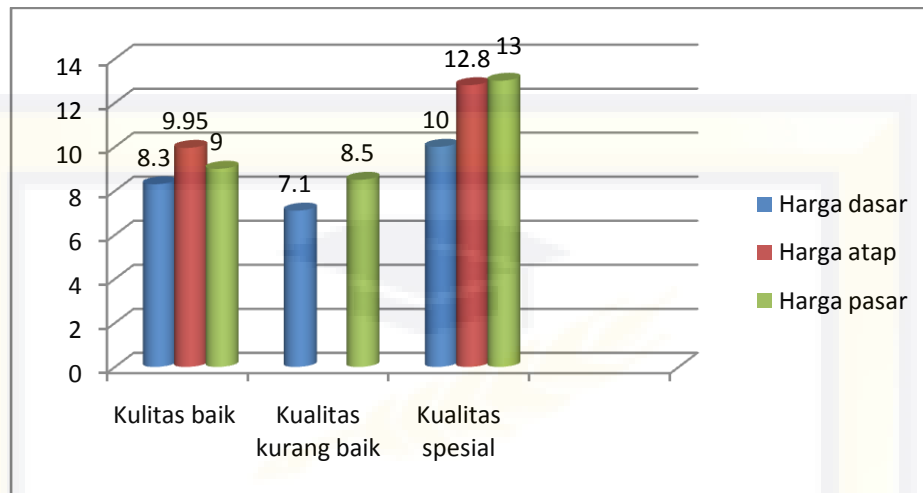
- 1) Menaikkan harga pasar
- 2) Menciptakan kelebihan penawaran
- 3) Berkurangnya permintaan
- 4) Menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan
- 5) Kenaikkan atau menurunkan penerimaan produsen

Tabel 5.3 Harga Pasar, Harga Dasar dan Harga Atap Beras Tahu 2017

Jenis Beras	Harga Dasar (Rp/Kg)	Harga Atap (Rp/Kg)	Harga Pasar (Rp/Kg)
a. Beras Medium	.		
1) Kualitas Baik	Rp. 8.300/kg	Rp.9.950/kg	Rp.9.000/kg
2) Kualitas Kurang Baik	Rp.7.100/kg		Rp.8.500/kg
b. Beras Peremium			
1) Kualitas Spesial	Rp.10.000/kg	Rp.12.800/kg	Rp.13.000/kg

Sumber :Bulog Makassar Panaikang 2017.

### Harga Pasar, Harga Dasar dan Harga Atap Tahun 2017



Sumber : Data Harga Beras 2017 (Tabel 5.4)

Dalam kebijakan harga beras tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam kebijakan harga atap dan harga dasar karena beras sendiri merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan barang komplementernya.

Dari dampak harga pasar, harga dasar, dan harga atap beras tahun 2017 diatas dapat dilihat memiliki harga dasar Rp 8.300/kg untuk beras Medium yang berkualitas Baik, sedangkan yang berkualitas rendah senilai Rp.7.100/kg. Harga untuk beras medium harga atap Rp.9.950/kg. Sedangkan harga pasar Rp.9.000/kg. Untuk kualitas rendah Rp.8.500/kg. Sedangkan harga beras Perenium harga dasar Rp.10.000/kg. Harga Atap Rp.12.800/kg. Dan harga Pasar Rp.13.000/kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa Harga beras pada tahun 2017 dapat dikatakan Maksimal/baik.

Dalam hal ini campur tangan pemerintah dalam ekonomi perbesaran nasional

a) Pada dasarnya ada lima yaitu:

- 1) Meningkatkan produksi padi
- 2) Meningkatkan pendapatan petani,
- 3) Mengurangi ketidakstabilan harga ditingkat produsen dan konsumen.
- 4) Mengendalikan keseimbangan harga beras diantara pasar domestik dan pasar internasional.

Stabilisasi harga beras oleh pemerintah dilakukan melalui mekanisme buffer stock yaitu dengan menetapkan harga dasar dan harga batas tertinggi. harga dasar (minimum) di jamin pemerintah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkendali terutama pada musim paceklik. Ini semuanya diusahakan dengan pengadaan beras dikala panen dan penyaluran di kala paceklik (Tim Pengkajian Kebijakan Perberasan Nasional, 2001).

Melalui Bulog pada tahun 2001 pemerintah melalui Inpres No.9 pada tahun 2001 mengganti kebijakan HDG menjadi Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HPP) dan selanjutnya diubah lagi menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui Inpres No 2 Pada tahun 2005 kebijakan HPP memang berbeda dengan kebijakan HDG, walaupun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyang harga gabah supaya tidak anjlok utamanya pada panen raya melalui intervensi peningkatan

permintaan pembelian harga gabah.

## B. Pengadaan atau pembelian beras dalam negeri

### a. Struktur Kanpus (5.5) Perum Bulog



#### 1. Wilayah Kerja

##### a) Kanpus Perum Bulog

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN. Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan Makanan (DBM).<sup>16</sup>

<sup>16</sup> [http://www.bulog.co.id/alur\\_pengadaan.php](http://www.bulog.co.id/alur_pengadaan.php) Copyright © 2012 bulog.co.id

Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP.

Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain:

- 1) Mengurus bahan pangan
- 2) Mengurus pengangkutan dan pengolahannya
- 3) Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bulog menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41, Bulog mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
  - b. Perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

b) Devre/Subdivre

Perum BULOG Subdivre adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas public dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, mendistribusikan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan atau

pengadaan beras.

#### 1. Kontrak Pengadaan

Penyerapan Gabah Dan Beras Oleh Bulog Salah satu tugas yang diemban oleh Perum Bulog sebagai BUMN yaitu melakukan kegiatan penyerapan gabah dan beras dari petani berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku. HPP yang berlaku di tahun ini dicantumkan dalam Inpres no. 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.

Dalam Inpres tersebut dicantumkan harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp. 3.700 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp. 4.600 per kg, dan beras Rp. 7.300 per kg.

Ketika harga gabah dan beras berada di bawah HPP, maka tugas Bulog untuk melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya berdasarkan HPP. Namun pada saat harga beras dan gabah diatas HPP, petani dapat meraih keuntungan lebih besar dengan menjualnya ke pasar umum.

Disaat yang bersamaan, Bulog akan melakukan Operasi Pasar (OP) untuk menstabilkan harga setelah mendapatkan penugasan/perintah dari Pemerintah. Sebelum HPP tahun 2017 diumumkan, Bulog telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai persiapan efektifitas penyerapan, antara lain penyediaan space gudang di daerah sentra produksi,

penyiapan tenaga surveyor/petugas pemeriksa kualitas, penyediaan dana pengadaan (l/c), penambahan jam kerja dan pelayanan dihari sabtu dan minggu.

Selain itu Bulog telah menyiapkan saluran pengadaan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pembelian gabah/beras sebanyak 83 unit, menyiapkan Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB) sebanyak 132 unit, menyiapkan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) yang sudah terseleksi sebanyak 1.338 dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 30 unit.

Melalui saluran pengadaan tersebut, hingga 1 April 2015, Bulog telah melakukan kontrak pengadaan sebanyak 50.744 ton setara beras dan telah ter-realisis sebanyak 31.074 ton setara beras.

HPP yang diberlakukan pemerintah juga mensyaratkan kriteria gabah dan beras yang dapat dibeli oleh Bulog. Kriteria itu meliputi kadar air maksimum, kadar hampa/kotoran maksimum, butir patah maksimum, kadar menir maksimum dan derajat sosoh minimum.

Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, maka gabah dan beras tersebut dapat disimpan untuk dipergunakan semasa paceklik atau kelangkaan pasokan. Beras yang diserap oleh Bulog selanjutnya digunakan salah satunya dalam program



penyaluran Raskin.

Raskin ditahun 2017 ini diperuntukkan untuk 15.530.897 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dengan pagu setahun sebesar 2.795.561 ton atau sebesar 232.963 ton per bulan. Raskin tahun 2017 telah ter-realisasi 534.430 ton sampai dengan 1 April 2017

c) Mitra Kerja

Mitra Kerja Pengadaan selanjutnya disebut MKP adalah perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras dan pangan lainnya. Landasan Kemitraan antara Perum BULOG dengan Mitra Kerja Pengadaan dilaksanakan berdasarkan pada

1. Komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan Kemitraan Pengadaan Pangan DN sesuai sasaran yang ditentukan
2. Tujuan bersama memenuhi target Pengadaan Pangan DN sesuai Instruksi Presiden RI tentang Kebijakan Perberasan Nasional yang berlaku dan kebijakan pangan lainnya
3. Berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi industri pangan nasional

#### d) UPGB

UPGB (Unit Pengolahan Gabah dan Beras) merupakan salah satu lini terdepan usaha Bulog. Keberadaan UPGB berfungsi sebagai pendukung pengadaan stok PSO dan juga sebagai pengembangan usaha BULOG untuk pasaran umum. Sebagai salah satu pendukung pengadaan, 22 lokasi UPGB se-Jawa timur yang berjumlah 26 unit menerapkan strategi pengadaan dalam negeri dalam rangka mempersiapkan panen raya Jawa Timur yang diperkirakan pada bulan Maret s/d Mei 2012.

Strategi tersebut diantaranya :

1. Melakukan pembelian Gabah berupa GKP (Gabah Kering Panen), GKG(Gabah Kering Giling) dan Beras Asalan untuk diproses.
2. Optimalisasi sarana yang ada seperti lantai jemur dan dryer
3. Menjalin Komunikasi dengan Kelompok Tani dan Gapoktan di lingkungan UPGB masing-masing untuk mengetahui sebaran panen
4. Meningkatkan Pembelian Beras hasil giling dari penggilingan-penggilingan kecil disekitar wilayah UPGB masing-masing
5. Mengikuti informasi hasil produksi dan harga pasar di wilayah masing-masing UPGB.

## 6. Satgas Survey Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Sebelum Masuk Gudang

### e) Gudang

Gudang Beras Siap Antisipasi Rawan Pangan Salah satu fungsi gudang beras mengantisipasi kerawanan pangan di daerah ini termasuk daerah lain harus menyediakan stok beras cukup agar bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam atau sesuatu hal yang bisa mengganggu distribusi pangan dari luar daerah.

#### 1. Petugas pemeriksa kualitas.

Fungsi petugas dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kualitas beras yang layak untuk di suplai kedaerah lain atau menjual ke pasar salah satunya melalui pemeriksaan kualitas beras.

#### 2. Perum Bulog akan memperketat beras yang masuk ke gudang guna menjaga kualitas beras tetap baik hingga di tangan penerima bantuan beras masyarakat.

#### 3. Bulog akan membuat standarisasi proses pemeriksaan sebelum masuk ke gudang dan disimpan Bulog, untuk menjaga kualitas beras agar tetap baik hingga ke tangan masyarakat penerima.

b. Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri.

Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan semangat berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*) dapat tercapai.

Petani dengan adanya HPP mempunyai perkiraan harga untuk melepas produksinya. Pilihan pasar yang terbuka antara BULOG dan pasar umum diharapkan akan memberikan daya tawar yang lebih baik bagi petani. Dengan HPP sebagai patokan harga jualnya, petani bisa memilih untuk menjual ke pasar umum atau ke BULOG.

Dari sisi operasional BULOG, terdapat tiga saluran dalam penyerapan produksi petani yaitu Satgas, Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) dan Mitra Kerja. Ketiga saluran tersebut membeli gabah langsung pada petani dengan patokan HPP.

Umumnya gabah yang dibeli adalah gabah pada kualitas apa adanya (di luar kualitas yang ada dalam Inpres). Sedangkan gabah yang diterima BULOG adalah Gabah Kering Giling (GKG) yaitu gabah dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa kotoran maksimum 3%. Kualitas ini cukup tahan disimpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada

saatnya. Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009, harga GKG di tingkat penggilingan adalah Rp.3.300/kg dan di gudang BULOG Rp.3.345/kg.

Satgas yang tidak memiliki sarana pengeringan maupun pengolahan dapat bekerjasama dengan UPGB atau Mitra Kerja melakukan pengolahan baik untuk mendapatkan GKG maupun beras standar. Dalam Inpres Nomor 7 tahun 2009 persyaratan kualitas beras yang diterima BULOG adalah beras dengan kadar air maksimal 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimal 95%. Beras dengan kualitas tersebut diterima BULOG dengan harga Rp.5.060/kg di gudang BULOG. (BULOG, 2010).

### C. Penyaluran Atau Distribusi Beras Rendah

#### a. Alur distribusi RASKIN dan pengadaannya

Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.

Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah

1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri

dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG.

2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN.
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG<sup>17</sup> dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

#### D. Operasi Stabilisasi Harga

Makassar, 23/1 (ANTARA) - BULOG Divre Sulawesi Selatan menilai belum perlu melaksanakan operasi stabilisasi harga beras di kota Makassar karena kenaikan harga yang terjadi akhir-akhir ini masih dalam batas toleransi. Kita terus memantau pergerakan harga ini dan bila kenaikannya sudah diluar batas toleransi maka operasi stabilisasi akan segera kita gelar, kata Kepala BULOG Divre Sulsel, Abdul Karim Pati di Makassar.

##### a) Operasi Pasar

Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras atau gabah baik pada petani dan masyarakat Kota Makassar , Bulog melakukan pengawasan dan

---

<sup>17</sup> <https://books.google.co.id/books?isbn=9790026773> Oleh Dr. Ir. Wahyu, MM, Dr. Iwan Setiawan, SP, Msi- 2017 BUMN Pangan dan Investasi Pangan, Penebar Swadaya. Alamat: Jl. Kerinci Blok A2 No 23 24 Cibubur, RT.2/RW.11, Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720

pengendalian harga beras serta distribusinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Bulog melakukan strategi yang dapat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras, Perum Bulog memiliki strategi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dengan melakukan Operasi pasar. Operasi pasar biasanya dilakukan untuk menambah jumlah pasokan beras melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada para konsumen pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

1. Operasi Pasar dilihat dari prosedurnya

- a. Operasi Pasar Kontrak

Yang dimaksud dengan Operasi Pasar Kontrak adalah penjualan beras yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan menyeimbangkan kondisi stok baik secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan keputusan/persetujuan Direksi Bulog dan pelaksanaan kontrak (Perjanjian Jual Beli) yang dilakukan di Bulog prosedur penyalurannya adalah sebagai berikut :

- 1) Calon pembeli mengajukan Surat Permohonan untuk membeli beras yang kualitasnya masih baik atau yang telah menurun kepada Direksi Bulog.
    - 2) Atas dasar persetujuan tertulis dari Direksi Bulog terhadap permohonan calon pembeli tersebut maka

pelaksanaan penjualan beras baru dapat diproses lebih lanjut.

- 3) Penjualan beras yang telah disetujui Direksi Bulog dilakukan secara Kontrak/Perjanjian Jual Beli (PJB) yang pelaksanaannya dilakukan di Bulog. Di dalam PJB tersebut mencantumkan antara lain jenis baran, kuantum, harga, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari harga kontrak, cara pembayaran, cara penyerahan beras, sanksi-sanksi dan lainlain. Ketentuan uang jaminan pelaksanaan dimaksudkan sebagai jaminan agar pihak pembeli benar-benar melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam PJB, sedangkan bagi Bulog merupakan dasar untuk mengalokasikan stock.
- 4) Cara pembayaran penjualan secara kontrak/PJB dapat dilakukan secara tunai atau secara kredit dengan Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang disetujui Bulog. Tempat pelaksanaan pembayaran diutamakan di Bulog.
- 5) Apabila pembayaran penjualan beras dalam kontrak/PJB dilakukan secara tunai, maka setelah PJB ditandatangani selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) HPBnya. Berdasarkan bukti setor yang telah diteliti kebenarannya oleh Divisi Pembiayaan, Divisi Penyaluran



beras membuat Prinlog.

- 6) Apabila pembayaran dialkuakn secara kredit, maka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PJB ditandatangani, pihak pembeli harus sudah menyerahkan Bank Garansi senilai harga beras dengan beban bunga. Bank Garansi diteliti kebenarannya oleh Divisi Pembiayaan.

Setelah adanya konfirmasi kebenaran Bank Garansi, Divisi Penyaluran beras Bank Garansi disimpan di Divisi Pembiayaan, apabila sampai tanggal yang telah ditentukan dalam PJB pihak pembeli tidak menyelesaikan pembayaran harga beras dan Bulog tidak memperpanjang berlakunya PJB, maka pihak Bulog segera menyurati Bank Penjamin untuk mencairkan Bank Garansi.

- 7) Apabila seluruh isi PJB telah dilaksanakan dan Divre telah membuat Berita Acara secara lengkap, maka Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan kepada pembeli. Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik Bulog apabila pihak pembeli membatalkan atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan yang terdapat dalam PJB.

b. Operasi Pasar Murni

Operasi Pasar Murni adalah operasi pasar yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan inflasi. Pelaksana OP adalah pedagang/penyalur beras di wilayah kerja Divre/Subdivre dan atau Satgas Divre/Subdivre. Operasi Pasar dilaksanakan atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan usulan Ka Divre karena terjadi gejolak harga beras di wilayah kerja Divre setempat.

1. Operasi Pasar Murni dari sudut pelakunya adalah sebagai berikut:

1) Operasi Pasar Murni melalui Penyalur.

a) Berdasarkan permohonan dari penyalur/pedagang, Divre/Subdivre menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) kepada penyalur untuk kuantum yang disetujui. Penyalur menyetor ke Rekening HPB Bulog di Kantor Cabang khusus BRI Jakarta, melalui Kantor Cabang BRI setempat, atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.

b) Setelah penyalur membayar SPS tersebut, berdasarkan Bukti Setor (BS) dari Bank yang telah diteliti oleh satuan kerja yang membidangi keuangan, Divre menerbitkan DO/SPPB atau Surat Perjanjian Pemberian Bantuan. Dengan dasar DO tersebut, penyalur mengambil beras ke gudang yang ditetapkan untuk selanjutnya disalurkan ke pengecer-pengecer di daerah pemasarannya.

c) Khusus untuk Divre tertentu, atas persetujuan Direksi Bulog pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) untuk selanjutnya segera ditransfer ke BRI Jakarta.

2) Operasi Pasar Murni melalui Satgas OP

a) Satgas OP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Kadivire/Kasubdivre.

b) Kepala Unit/Penanggung Jawab Satgas oleh Kadivire/Kasubdivre mengajukan permohonan tertulis untuk kebutuhan penyaluran selama 7 (tujuh) hari. Permohonan harus mencantumkan kuantum dan daerah pemasaran.

c) Setelah disetujui oleh Kadivire/Kasubdivre, maka dikeluarkan DO (dengan pembayaran terhutang) diterbitkan secara bertahap untuk maksimal kebutuhan penyaluran 2 hari.

d) Realisasi DO tersebut harus sudah dipertanggungjawabkan dalam waktu 2x24 jam. Atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi setempat, Kadivire/Kasubdivre dapat memberikan perpanjangan batas waktu selama-lamanya 24 jam.

e) Beras yang sudah terjual diterbitkan SPS oleh Kadivire/Kasubdivre atau pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya penanggung jawab Satgas menyetorkan ke Bank dengan rekening yang telah ditentukan. Beras yang belum terjual dikembalikan ke gudang sesuai dengan prosedur pemasukan beras. Pemasukan beras tersebut sebagai bagian dari pemasukan beras. Pemasukan beras tersebut sebagai bagian dari pelunasan hutang Satgas. Untuk pengamanan, uang hasil penjualan beras yang belum disetorkan ke Bank harus disimpan di kas Divre/Subdivre.

f) Pada akhir pelaksanaan tugas, Kepala Unit atau Penanggung Jawab Satgas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan dilampiri bukti setor.

### 3) Operasi Pasar Khusus II

Adalah operasi pasar yang bertujuan membantu masyarakat di daerah tertentu yang sangat lemah daya beli dan oleh sebab itu diberikan secara cuma-cuma. Pelaksanaannya dilakukan oleh Satgas OP Divre atau Subdivre bekerjasama dengan aparat-aparat Pemerintah setempat.

a. Prosedur penyalurannya sebagai berikut :

1) Operasi Pasar Khusus II dilaksanakan atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur. Permintaan tersebut dapat

dilakukan secara langsung ke Direksi Bulog atau melalui Kadivreg dengan menyebutkan secara jelas dan terinci daerah, kuantum dan jumlah penduduk serta alasan yang mendukung.

2) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Bulog, Kadivreg menerbitkan Surat Perintah pembentukan Satgas OP Khusus II dan selanjutnya melaksanakan OP Khusus II dengan menerbitkan DO.

3) Atas dasar DO yang telah diterbitkan satuan kerja yang membidangi akuntansi membukukan sebagai piutang OP Khusus II. Sisa beras yang tidak tersalurkan dikembalikan ke gudang sesuai prosedur pemasukan beras di gudang dan dicatat sebagai pengurangan piutang oleh satuan kerja yang membidangi akuntansi.

4) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan OP Khusus II yang ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat, Divreg mendebet-notakan ke Bulog harga beras untuk OP Khusus II tersebut sebesar jumlah kuantum yang disalurkan dikalikan dengan harga buku beras untuk diselesaikan dengan Departemen Keuangan.

5) Penyelesaian penagihan harga beras untuk keperluan OP Khusus II, harus dilengkapi dengan rekapitulasi berita acara pelaksanaan OP Khusus II yang ditandatangani oleh Pemda setempat. Divre mengirimkan rekapitulasi BA pelaksanaan OP Khusus tersebut ke Divisi Penyaluran (asli) dan tembusan dikirim ke Divisi Pembiayaan dan Divisi Akuntansi.

Dengan penerapan strategi Operasi pasar murni tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kenaikan harga beras dan memaksimalkan stok bibit padi sebagai penunjang kualitas dan kuantitas padi yang dihasilkan. Selain itu ketersediaan jenis pupuk yang sesuai juga sangat dibutuhkan. Yang dilakukan Bulog harus mampu membuat masyarakat tidak kapok menerima beras terutama Raskin.

Dalam keseharian pun Bulog juga harus mampu menurunkan harga beras apabila terjadi kenaikan yang relative tinggi. Diharapkan evaluasi yang dilakukan dapat mengawasi strategi dan distribusi yang dilakukan Bulog serta masyarakat Kota Makassar pada khususnya, sehingga tidak terjadi lonjakan tinggi dari harga beras di pasaran dan penerima Raskin pun puas karena beras yang diterima berkualitas baik.

Operasi pasar yang diadakan di Kota Makassar Pada bulan Januari 2013, harga beras kualitas medium jenis IR 64 yang biasanya Rp 3.700/kg, di pasaran harganya mencapai Rp 5.700/Kg, kemudian pada tanggal 24 Januari 2013 diadakan operasi pasar dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2013, pada akhir operasi pasar harga beras turun menjadi Rp3.900/Kg.

Harga beras bisa turun setelah Gudang Bulog menyalurkan beras sebanyak 650 ton untuk 4 Kabupaten Kota. Harga Rp 3.900/Kg dianggap tidak terlalu tinggi ditambah nantinya harga akan turun sendiri, karena pada bulan Maret-April 2013 mulai panen raya. 4.1.3.2 Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin.

Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program

diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.

Penentuan kriteria penerima manfaat raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat raskin masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh raskin.

Hal inilah yang menjadikan raskin sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran. Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksanaan raskin. Raskin bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga.

Raskin telah mengurangi permintaan beras ke pasar. Dampak raskin terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada



tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam

#### E. Mengelola Cadangan dan Menjaga Cadangan Beras

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi (Jelliffe & Jelliffe 1989). Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya (Deptan 2009).

##### a. Pengelolaan cadangan pangan oleh Bulog Subdvire Panaikang sebagai berikut

1. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
2. Informasi mengenai rawan pangan yang meliputi potensi terjadinya rawan pangan transien, potensi terjadinya bencana, penyebab timbulnya bencana, jenis dan besarnya bencana, dampak kemanusiaan (jumlah korban), kedalaman dampak (jumlah kerugian materi), dan kebutuhan yang mendesak, termasuk untuk pengendalian gejolak harga.
3. Memperhitungkan total kebutuhan konsumsi minimal masyarakat (tiga bulan dalam satu tahun) dalam bentuk natura

(bahan makanan dan cadangan pangan hidup atau uang).<sup>18</sup>

## F. Menjaga harga HPP

1. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Pemerintah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras untuk melindungi produsen dan konsumen dari gejolak harga pasar.

Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja) maksudnya, peneliti sendiri yang menentukan sendiri sampel yang di ambil karena ada pertimbangan tertentu. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapat yang diperoleh melalui instansi – instansi yang terkait seperti BPS, Badan Ketahanan Pangan Bulog Subdevire. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras dipengaruhi tingkat ketersediaan beras di Bulog Subdevire Panaikang.

Ketersediaan beras di Bulog Subdevire Panaikang mencukupi kebutuhan beras di Pasar. Transmisi harga GKP mempengaruhi oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

- a. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras Terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras

Beras merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan beberapa kebijakan salah

---

<sup>18</sup> <https://makassar.antarane.ws.com/berita/27643/bulog-tetap-fokus-jaga-kualitas-beras>  
Makassar (ANTARA News) 2017

satunya kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) beras guna menjaga stabilitas harga beras. Kebijakan HPP ini lah yang dijadikan harga dasar penjualan gabah oleh petani.

Artinya untuk melindungi petani maka harga gabah tidak boleh dijual dibawah harga dasar gabah yang telah ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya penetapan Kebijakan HPP oleh pemerintah adalah merupakan intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga di pasar. Rendahnya elastisitas permintaan atas gabah dibandingkan elastisitas penawaran gabah yang dapat menyebabkan timbulnya kondisi tidak stabil yang tentu saja dapat merugikan produsen.

Perubahan pada supply ini akan ditransmisikan dalam bentuk tekanan besar terhadap harga produsen yang akan menyebabkan terjadinya kondisi tak seimbang pada harga pasar (terjadi pergeseran keseimbangan pasar).

Fakta ini lah yang menyebabkan intervensi pemerintah dalam penetapan HPP gabah sangat penting terutama melindungi kesejahteraan produsen dan konsumen secara berimbang. Kebijakan HPP oleh pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti harga ditingkat petani yang mempertimbangkan tingkat pendapatan petani tersebut, perubahan pola konsumsi akibat harga yang terbentuk berdasarkan pada penetapan HPP serta, harapan penetapan HPP dalam rangka merangsang meningkatkan

produksi oleh petani agar tercapai keseimbangan pangan.

#### G. Pengelolaan penyebab stok yang merata.

Kelangkaan dan kenaikan harga beras premium terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Harganya melejitkan mencapai Rp 13 ribu per kilogram (kg). Alhasil Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan impor beras hingga 500 ribu ton untuk menormalkan harga beras. Bagaimana di Sulsel? Divisi Regional (Kadivreg) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulsel merespon negatif kebijakan kemendag.

Bahkan, Bulog Sulsel siap menyuplai berasnya ke daerah lain yang membutuhkan. Kepala Divre Bulog Sulsel, Dindin Syamsuddin di sela launching program Operasi Pasar Cadangan Beras pemerintah (OP CBP) di Kompleks Gudang GBM Panaikang Jl Urip Sumoharjo, Jumat (12/1) menuturkan, stok beras di Sulsel mencapai 82 ribu ton.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan, Kasan melepas truk operasi pasar beras medium di kawas<sup>19</sup> pergudangan Divre Bulog Sulselbar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (12/1).

Perum Bulog melepas beras kualitas medium dengan harga murah Rp 9.450 per kilogram ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Sulselbar dengan harapan kebutuhan beras di masyarakat dapat terpenuhi dan mampu menekan gejolak kenaikan harga beras di pasaran yang sering mengalami fluktuasi. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

---

<sup>19</sup> Jones, J.J. 1991. *Earnings Management During Import Relief Investigations*. Journal Accounting of Research. Vol.29. No.2. Hlm 193-228

Ini mampu memenuhi kebutuhan hingga 20 bulan ke depan. Besok pun kami kirimkan lagi beras ke Aceh dengan harga di bawah HET, kata lelaki berkumis lebat itu. Dindin mengungkapkan, HET beras saat ini sebesar Rp 9.450 per kilogram (kg). Namun, Bulog Sulsel menjualnya dengan harga Rp 9 ribu per kg untuk menormalkan harga beras premium di pasaran.

Sudah harga murah, kualitas pun bagus daripada impor. Beras kami bijinya utuh dan putih, sangat disukai banyak orang, katanya. Dindin menuturkan, pihaknya telah melakukan pembelian di petani-petani Sulsel meski harganya relatif hampir sama dengan penjualan. Dia pun akan bersedia memenuhi permintaan dari daerah-daerah di Indonesia.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga setelah penulis melakukan pembahasan mengenai strategi Bulog dalam mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar sebagai berikut :

1. Stabilisasi harga beras di kota makassar, pada tahun 2017. Maka dapat disimpulkan peran bulog subdevire Panaikang dalam upaya stabilisasi harga beras Maksimal/baik pada tahun 2017.

#### B. Saran

Beberapa saran akan penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bulog subdevire panaikang kota Makassar dapat mempertahankan kebijakan stabilitasi harga seperti pada tahun 2017.
2. Peran pemerintah terhadap perum Bulog agar dapat bersikap tegas kepada kebijakan harga gelap (harga pasar) agar tidak menggelapkan harga kepada konsumen.
3. Kebijakan beras kualitas rendah (raskin) dapat di berdayakan semaksimal mungkin demi memenuhi kebutuhan masyarakat lemah (miskin).

## DOKUMENTASI



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- B KP (Badan Ketahanan Pangan ). 2 0 0 5 . *Profil 60 Tahun Pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia*. Badan Ketahanan Pangan, Jakarta: 267 hlm.
- Dr.Husaini Usman.M.Pd. dan Purnomo Setiay Akbar, M.Pd.1996.*Metode Penelitian Sosial*. BUMI AKSARA. Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta: 13220.
- Friedman, Marilyn M. *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep, Struktur (1992) Family Nursing.Theory & practice*. 3/E. Debora Ina R.L. (1998) ( alih bahasa) Jakarta : EGC.
- Pujihastuti E. 2008. *Analisis Kebijakan Perusahaan Dalam Pengendalian Persediaan Bahan Baku*. Dalam Jurnal Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Pranolo. Tito. 2000. *Peran Bulog Sebagai Lembaga Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional*. Makalah Round Table Kebijaksanaan Harga Gabah,Deptan, Jakarta:
- Widarjono. A, 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya (Cetakan Ketiga)*, Penerbit Ekonesia, Yogyakarta:
- Siti Rochaeni. 2014. *Pembangunan Pertanian Indonesia Edisi 2*. Ruko Jambusari 7A Yogyakarta: 55283.
- Tati Nurmala,dkk.2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Ruko Jambusari 7A Yogyakarta: 55283.



## INTERNETAN :

http:// BKP (Badan Ketahanan Pangan). 2014. Review kebijakan harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras. Jakarta: Diakses Tanggal 10 Januari 2014.

<https://books.google.co.id/books?isbn=9790026773> Oleh Dr. Ir. Wahyu, MM, Dr. Iwan Setiawan, SP, Msi- 2017 BUMN Pangan dan Investasi Pangan, Penebar Swadaya. Alamat: Jl. Kerinci Blok A2 No 23 24

http://Departemen Pertanian, 2002. Keragaan dan Kebijakan Perberasan Indonesia. Departemen Pertanian, Jakarta: Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2011.

http://Darwanto, D.H. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani, Jurnal Ilmu Pertanian, 12 (2), hal. 152-164. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2014

http://Food Summit the World. 1996. di Roma, Italia, Problem Ketahanan Pangan Global (Global Food Security) [www.tipspendidikan.site/2015/04/](http://www.tipspendidikan.site/2015/04/) . Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2017

http://Jones, J.J. 1991. *Earnings Management During Import Relief Investigations*. Journal Accounting of Research. Vol.29. No.2. Hlm 193-228. Diakse Pada Tanggal 22 Maret 2001

<http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian>  
<http://rosimoke.blogspot.com/2013/01/proposal-penelitian-peranan-kepaladesa>. Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2013.

http://Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 2012. Kebutuhan Pangan Negara Indonesia. <http://Randy.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2012.

<https://makassar.antarane.ws.com/berita/27643/bulog-tetap-fokus-jaga-kualitas-beras> Makassar (ANTARA News) 2017. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2017

<http://www.bulog.co.id/sejarah.php> Copyright © 2012 bulog.co.id. Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2013

<https://www.google.com> ( BOKS I : Pengantar Ilmu Pertanian Jl Beo 38-40 Tlp(0274)561881 fax-(0274)58828.-E-mail:Info@andipublisher.com.

Cibubur, RT.2/RW.11, Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720

**WAWANCARA :**

Aulia Akbar, Seksi Adiministrasi dan Keuangan. Bulog Subdevire Panaikang Kota Makassar. Pada Tnggal 15 Desember 2017

Andi Asrul, Sekksi Operasional dan Pelayanan Publik. Bulog Subdevire Panaikang Kota Makassar. 16 Desemberm 2017

Ogi Wahid, Seksi Akutansi Manejemen Resiko dan Kepatuhan. Bulog Subdevire Panikang Kota Makassar. 16 Desember 2017

